



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Februari 2017

Halaman: 13

Panwas Bakal Keliling Antisipasi Politik Uang dan Kampanye Terselubung

Masa Tenang Rawan Bagi-bagi Uang

Money Politics atau politik uang dan kampanye terselubung menjadi salah satu kerawanan di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 Februari mendatang. Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu (Panwaslu) juga melarang konsolidasi partai dengan warga di masa tenang.

Mengantisipasi munculnya politik uang atau kampanye terselubung, panwas pun siap berkeliling di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di masa tenang. "Kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan dengan meminta semua pengawas TPS untuk berkeliling pada masa tenang," ujar Komisiner Pan-

waslu Kota Yogya Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Ferdian Susanto, Rabu (8/2).

Iwan menyebutkan, kerawanan pada masa tenang itu diantaranya adalah rawan kampanye terselubung yakni dengan penyebaran brosur atau alat kampanye. Selain itu juga ada kerawanan pada bagi-bagi uang.

● ke halaman 14

Masa Tenang Rawan Bagi-bagi

● Sambungan Hal 13

Sementara, untuk konsolidasi partai pada masa tenang pun sempat terjadi perdebatan. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini dilarang lantaran akan berpotensi disalahgunakan untuk kampanye.

Selain itu, pihaknya juga meminta 794 pengawas TPS untuk tetap cermat melihat beberapa kerawanan yang berpotensi muncul di masa tenang. Para pengawas yang sudah mendapat bimbingan teknis ini pun sudah dilatih untuk melaporkan kejadian.

"Bahkan, pada saat pemungutan suara para pengawas akan melaporkan segala kejadian secara online. Kami akan mengupload secara online," ujarnya.

Panwaslu pun juga mengingatkan sejumlah

pihak untuk tetap menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Pihak Panwaslu melakukan koordinasi dan konsolidasi tersebut dengan pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI. Hal ini juga untuk terciptanya proses Pilkada yang aman dan damai tanpa pelanggaran.

Partisipasi

Sementara itu, Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DIY, Beny Susanto juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Pasalnya, pada masa tenang Pilkada akan sangat rawan dengan pelanggaran seperti politik uang.

"Tugas pengawasan berada di pundak Panwas, namun karena terbatas jangkaiannya, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga Pilkada yang berintegritas," ulas Beny.

Dia menambahkan, agar masyarakat tidak mudah

diliming-mingi dengan politik uang dan mempengaruhi hak pilih warga. Selain itu, dia juga meminta semua pasangan calon, tim sukses, partai pengusung dan relawan untuk menghormati masa tenang dan memberi kesempatan kepada warga untuk memahami visi misi pasangan calon.

Pilkada serentak 2017 bukanlah sekadar elektoral 5 tahunan, namun ada nilai substansi di dalamnya, yakni nilai demokrasi, kebangsaan, dan keindonesiasan. Karena itu, momentum pilkada merupakan pendalaman demokrasi dan memperkuat keindonesiasan.

"Integritas Pilkada, keamanan masyarakat tidak hanya dipikul stakeholder, KPU, Panwaslu dan aparat keamanan. Namun, juga partisipasi masyarakat. Apalagi, pembiayaan Pilkada dari APBD sebagian bersumber pada pembayaran pajak," ujarnya. (ais)

	Tindak Lanjut
st	☐ Untuk Ditanggapi
agera	☐ Untuk Diketahui
	☐ Untuk Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005